



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2024



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas petunjuk dan karunia-NYA, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) ini merupakan bahan evaluasi bagi pimpinan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan Badan sesuai dengan visi, misi, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami sadar karena keterbatasan kemampuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka banyak kekurangannya, maka kami mohon saran perbaikan dan masukan dalam penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Majalengka, 3 Februari 2025

Mengetahui :	
Sekretaris	
Bidang Kesatuan Bangsa	
Bidang Poldagri dan Ormas	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MAJALENGKA



**Dr. H. HERI RAHYUBI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660822 198903 1 005

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, wajib menyusun LKIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan, 1 Sekretaris, 2 kepala Bidang, 1 kepala subbagian, 6 Kelompok Jabatan Fungsional. Jumlah pegawai secara keseluruhan 23 orang yang terdiri dari 17 orang PNS 6 orang Tenaga Harian Lepas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sasaran Strategis Bupati Majalengka sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan ditindak lanjuti di dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka 2024-2026 yaitu “Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI”. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka melaksanakan 1 (satu) Urusan Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menjalankan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 29(Sub Kegiatan) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 41.627.867.680,- (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang bersumber dari APBD dan terealisasi sebesar Rp. 41.478.837.265 ,- (Empat Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima rupiah) atau 99.64%. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2024 untuk terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja dari 2 Sasaran dengan 2 indikator. Capaian atas indikator pada tahun 2024 yaitu 20,83% dan 80.00% karena realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dimana capaian tahun 2024.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka maka telah dilakukan rapat koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih baik antara lain dengan melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang kurang tepat sasaran, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dengan merevisi dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

<p><b>KATA PENGANTAR</b></p>	<p>2</p>	<p><b>DAFTAR ISI</b></p>	<p>6</p>
<p><b>BAB I PENDAHULUAN</b></p> <p>GAMBARAN UMUM DATA KEPEGAWAIAN ISU STRATEGIS SISTEMATIKA PELAPORAN</p>	<p>7</p>	<p><b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b></p> <p>RENCANA STRATEGIS PERKIN 2024 RENCANA ANGGARAN 2024</p>	<p>11</p>
<p><b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b></p> <p>PENGUKURAN KINERJA 2024 ANALISIS CAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN</p>	<p>17</p>	<p><b>BAB IV PENUTUP</b></p>	<p>41</p>
<p><b>LAMPIRAN</b></p>	<p>43</p>		

# Daftar Isi

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **1.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **a. Kedudukan**

Berdasarkan perbup 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, brkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## b. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di bidang kesatuan bangsa dan politik dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

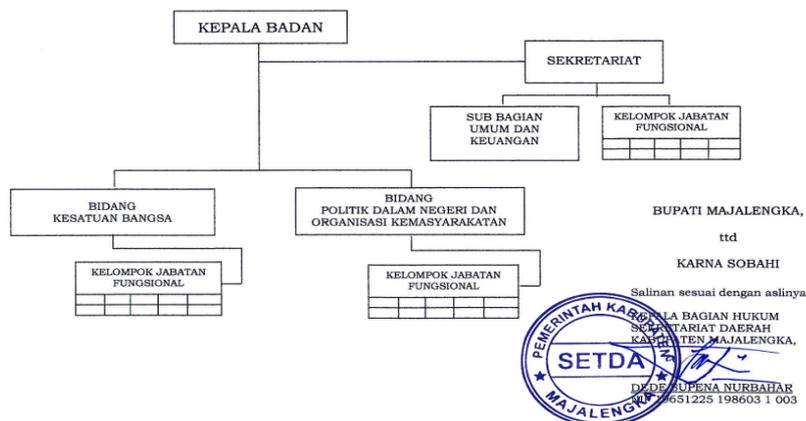
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## c. Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : 71 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 Desember 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA



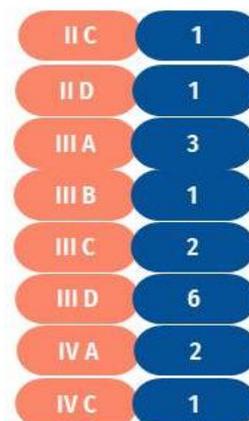
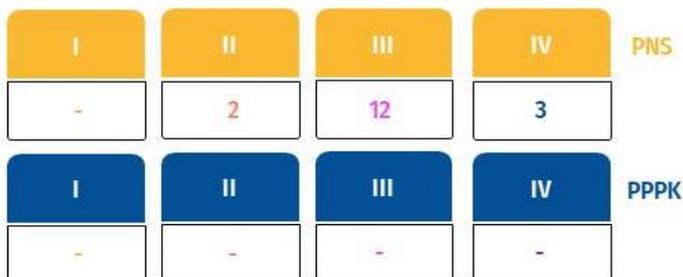
## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2024 berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

### INFOGRAFIK ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



#### Eselon



#### Golongan

#### Jenis Jabatan

STRUKTURAL

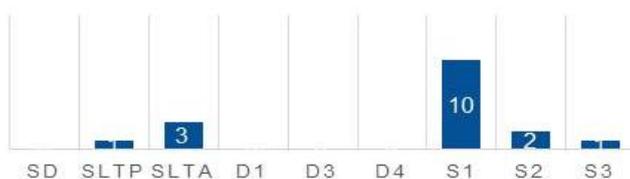


PELAKSANA



FUNGSIONAL

#### Pendidikan



### 1.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka, telaah visi- misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2024-2026 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Majalengka untuk 3 (Tiga) tahun ke depan, yaitu :

1. Pemahaman Ideologi, nilai nilai pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin pudar; Tidak bisa di pungkiri bahwa dengan semakin majunya teknologi saat ini membuat masyarakat kurang menerapkan nilai nilai pancasila yang luhur dan melemahnya wawasan kebangsaan masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air semakin kurang, jelas ini adalah isu strategis yang akan menjadi acuan kita dalam meningkatkan lagi pemahaman dan rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai Badan yang memiliki tugas dalam hal ini.
2. Potensi Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya dan ekonomi, serta munculnya ekseseks negatif dengan munculnya modus modus kejahatan yang baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional
3. Pendidikan Politik masyarakat yang masih rendah; Pendidikan politik yang masih rendah dapat di lihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada serta masih maraknya konflik konflik yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilukada.
4. Krisis kepercayaan kepada pemerintah; Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan kurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai konflik sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan

5. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang mulai memudar  
Menurunnya harmonisasi kehidupan masyarakat dikarenakan meningkatnya individualisme masyarakat dengan majunya teknologi dan maraknya konflik dan kekerasan komunal di tengah masyarakat saat ini.

#### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

##### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

##### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

##### **Bab IV Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

##### **Lampiran**

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dipublikasikan, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai.

# BAB 2

**PERENCANAAN KINERJA**

**RENSTRA**

**PERKIN 2024**

**Rencana Anggaran 2024**

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Rencana Strategis**

Tujuan
Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI.
Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI.

Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial.

Indikator
Tingkat Bina Kesatuan Bangsa
Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024-2026  
Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Persen	100	100	100	80,00	85,00	90,00
2	Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI.	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial.	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	21,00	28,00	36,00

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100%
2	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	100%

## 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan Rencana Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari:

Tabel. 2.3

Program	Rencana Anggaran (Rp)	(%)
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 169.000.000	0.06 %
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	RP. 36.157.463.000	89.62%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.139.330.000	2.33%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.319.850.000	0.57 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1218.775.000	0.18 %
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.697.867.681	7.24 %
Jumlah	Rp. 41.627.867.680	100%

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2024

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata 50,41 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

### Capaian IKU

	IKU	IKU
■ Capaian IKU	80	20,83

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 sasaran dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka pada Tahun 2024. Dari 2 indikator sasaran yang ditargetkan Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja lebih dari 80 % dan 1 target indikator yang kurang mencapai 20.38%.

**3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	80 %	80%
2	Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	100%	20,83%	20,83%

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa

CAPAIAN 2024



FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Kesadaran Tentang Kebebasan, Kesenjangan dan Lembaga Demokrasi
- ❖ Meningkatnya Pengamalan Masyarakat Tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- ❖ Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- ❖ Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Ormas
- ❖ Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Badan Kesbangpol

PROGRAM

Yang mendukung

- ❖ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program
- ❖ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya
- ❖ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- ❖ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya 80%

MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN KESATUAN BANGSA



### 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tingkat Bina Kesatuan Bangsa

#### a. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2024

Target dengan Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100%	80 %	80%

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa adalah data hasil pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Sasaran Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa dengan Indikator tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 80 % semakin banyaknya orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan maka semakin bagus persentasenya.

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa merujuk pada upaya dan tahapan dalam membangun dan memperkuat persatuan serta kesatuan dalam suatu bangsa. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk:

1. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
  - a. Pembinaan ideologi Pancasila.
  - b. Peningkatan wawasan kebangsaan.
  - c. Penanaman nilai-nilai karakter bangsa.
2. Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional:
  - a. Penyelenggaraan politik dalam negeri yang sehat.
  - b. Peningkatan ketahanan nasional.
  - c. Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan.
3. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional:
  - a. Upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial.

- b. Peningkatan kewaspadaan nasional.
- 4. Organisasi Kemasyarakatan:
  - a. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
  - b. Fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Upaya-upaya tersebut umumnya dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di tingkat daerah. Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam:

- \* Merumuskan kebijakan teknis.
- \* Melaksanakan pembinaan.
- \* Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Dengan demikian, Tingkat Bina Kesatuan Bangsa mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa.

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa dapat dihitung dengan rumus Jumlah orang yang melaksanakan hasil pembinaan dibagi jumlah orang yang mengikuti Bina Kesatuan Bangsa dikali seratus persen, maka Jumlah orang yang melaksanakan hasil pembinaan sebanyak 870 Orang, jumlah orang yang mengikuti Bina Kesatuan Bangsa sebanyak 1.082 Orang pada tahun 2024 maka jumlah Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 80.00 %. Dapat dilihat dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Orang yang melaksanakan hasil Bina Kesatuan Bangsa}}{\text{Jumlah Orang yang mengikuti Bina Kesatuan Bangsa}} \times 100$$

$$\frac{870}{1082} = 0,80 \times 100 = 80,00$$

### **b. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Peningkatan /Penurunan Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %	80 %	20 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada tahun 2024 mengalami Penurunan dibanding dengan nilai capaian tahun 2023. Terlepas dari hal tersebut diatas, pada prinsipnya upaya optimalisasi kinerja karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan, terbukti dengan adanya 80 % capaian kinerja tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya (tahun 2023). orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan lebih besar tahun 2023 dari tahun 2024.

### **c. Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target akhir Renstra**

Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	80 %	100 %	80%

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perbandingan capaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada target akhir Renstra 2024-2026 capaian kinerja Tingkat Bina Kesatuan Bangsa di Kabupaten

Majalengka 80 % dari target kinerja 100 % dikarenakan orang yang melaksanakan hasil pembinaan dari hasil pembinaan yang telah dilakukan lebih besar tahun 2023 dari tahun 2024.

**d. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Rata - rata Provinsi**

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Rata-Rata Provinsi 2024	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	80 %	-	-

Berdasarkan tabel Indikator diatas tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi karena indikator yang digunakan berbeda.

**e. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan**

1. Meningkatnya Kesadaran tentang Kebebasan, Kesenjangan dan Lembaga Demokrasi



Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau

sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Secara

konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Untuk mengupayakan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a) Membina Masyarakat dalam pendidikan politik

Kegiatan ini diberikan kepada Organisasi Perempuan di Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2024 pembinaan ini telah dilaksanakan bertempat di Aula Nyi Rambut Kasih Majalengka. Pendidikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka mengundang Narasumber dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum serta dari Akademisi. Pembinaan pendidikan politik ini penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya generasi muda dalam pemilihan umum.

b) Menyalurkan bantuan keuangan hibah tahunan

Setiap tahunnya Pemkab Majalengka menyalurkan bantuan dana hibah bagi sejumlah partai politik



(Parpol) yang memiliki kursi sebagai wakil rakyat untuk

kepentingan partai, dana hibah tersebut ditujukan

untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bantuan dana hibah kepada parpol tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Dana hibah itu terdapat tiga bagian fungsinya, untuk pendidikan politik, kesekretariatan dan operasional. Namun, Parpol harus menggunakan 60 persen dari dana tersebut untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Pemberian dana tersebut, berdasarkan PP No.5/2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Sesuai PP tersebut Pemkab Majalengka memberikan bantuan kepada parpol yang memiliki wakil di DPRD Majalengka berupa dana hibah dari APBD daerah. Jumlah bantuan kepada setiap parpol berbeda-beda, ditentukan berdasarkan suara yang diperoleh partai politik itu sendiri pada saat pemilu tahun 2019 lalu. Setidaknya ada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Majalengka periode 2019-2024, PDIP 15 kursi, Gerindra 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKS 5 kursi, PKB 5 kursi dan PAN 5 Kursi. Selanjutnya, Nasdem 3 kursi, PPP 2 kursi, Demokrat 2 kursi. Parpol tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp 3.000 untuk satu suara yang diperoleh pada pemilu, Terdapat 672.271 suara yang diperoleh oleh 9 parpol tersebut, dan total dana bantuan yang akan diberikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.016.813.000, Bertempat di DPRD Majalengka.

## 2. Meningkatnya Pengamalan Masyarakat tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan



Negara Indonesia adalah negara bangsa yang dibangun atas dasar

keanekaragaman suku-suku bangsa. Dalam kondisi Keanekaragaman suku bangsa, bangsa Indonesia telah bertekad untuk hidup dalam tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia, dengan dasar semboyan Bhineka Tunggal Ika. Guna mewujudkan dan memantapkan paham kesatuan atas dasar perbedaan, diperlukan pola wawasan kebangsaan Indonesia yang utuh.

Maka dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan:

a) Membina generasi muda dalam penguatan karakter kepemimpinan berwawasan bela negara

Pada Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka telah melaksanakan kegiatan Wawasan Kebangsaan *Goes to School* untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia dan memahami empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Pada Tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan di di SMAN 2 Majalengka, SMKN 1 Lemahsugih, SMAN 1 Kadipaten, SMKN 1 Kertajati dan SMAN 1 Jatitujuh.

Selain itu, untuk meningkatkan pengamalan ideologi dan wawasan kebangsaan juga telah dibentuk Kampung Pancasila di Desa Kawunghilir Kecamatan

Cigasong, Kabupaten Majalengka.



Pembentukan Kampung Pancasila ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan pertimbangan yang muncul dalam konteks

perkembangan zaman, pengaruh globalisasi, serta kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang latar belakang terbentuknya Kampung Pancasila:

#### 1. Ketimpangan Nilai Pancasila

Dalam perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila mengalami ketimpangan dalam masyarakat. Ketimpangan ini mungkin terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup nasional.

Pengaruh globalisasi, yang mencakup arus informasi, budaya, dan ekonomi yang lebih terbuka, dapat memengaruhi nilai-nilai tradisional dan identitas nasional. Globalisasi memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa, tetapi juga dapat membawa ancaman terhadap kelestarian nilai-nilai dan identitas budaya.

Mengatasi Ancaman terhadap Identitas Bangsa

Indonesia Terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan tergerusnya identitas bangsa Indonesia akibat pengaruh globalisasi yang kuat. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai landasan ideologi negara yang dapat mempertahankan dan memperkuat identitas bangsa.

Kampung Pancasila sebagai Solusi untuk mengatasi ketimpangan nilai Pancasila dan ancaman terhadap identitas bangsa, inisiatif Kampung Pancasila di Desa Kawunghilir dan daerah serupa diresmikan. Ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, terbentuknya Kampung Pancasila merupakan

respons terhadap perubahan

zaman, pengaruh globalisasi, dan

kebutuhan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup nasional. Ini adalah upaya untuk menjaga dan memperkuat identitas budaya Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pada tanggal 19 Desember 2024 diperingati sebagai Hari Bela Negara ke-76. Hal tersebut diatur dalam



Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Dalam rangka memperingati

Hari Bela Negara setiap 19 Desember, masyarakat dapat mengikuti pedoman pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara (PKBN). Implementasi kesadaran bela negara tersebut dapat dilakukan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Berikut ini nilai dasar atau unsur dasar pelaksanaan bela negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, yaitu: Cinta tanah air, Sadar berbangsa dan bernegara, Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, Rela berkorban untuk bangsa dan negara, Memiliki kemampuan awal bela negara bertempat di Yonif Raider 321 Galuh Taruna Majalengka.

Telah dilaksanakan Upacara Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016, tanggal 1



Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai Hari

Lahir Pancasila. Maka dalam Hal ini Bakesbangpol Majalengka Secara Rutin Melaksanakan Hari Lahir Pancasila Pada Setiap Tanggal 1 Juni Bertempat di Pendopo Majalengka.

b) Membina pemuda kader Kabupaten yang terseleksi dan diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera



Paskibraka adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas

utamanya mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor Bupati/Wali Kota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Merdeka). Anggotanya berasal dari pelajar SMA Sederajat kelas 1 atau 2. Penyeleksian anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 17 Agustus. Di Kabupaten Majalengka Sendiri terdiri dari 32 Pasukan Paskibraka 45 Pasukan TNI/Polri, Bertempat di GGM Majalengka.

### **3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**



Kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta

praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

Pada Tahun 2024 Bakesbangpol Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembinaan masyarakat dan anggota FKUB dalam pemahaman kearifan lokal, penguatan peran FKUB dan diseminasi kerawanan ketahanan yang dihadiri oleh Tim Penganut Aliran Kepercayaan (Pakem) yang terdiri dari Anggota TNI, Polri, Kejasaaan, Tokoh Agama dan Kepala Daerah (Bupati). Dalam Setiap Triwulan atau 3 Bulan Sekali Melakukan Rapat Hasil Pemantauan dilapangan Bertempat di Aula Kejaksaan Kabupaten Majalengka.

#### 4. Meningkatnya Kemandirian dan Keberdayaan Ormas

Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2013



Tentang Organisasi  
Kemasyarakatan,  
Organisasi  
Kemasyarakatan  
yang selanjutnya  
disebut Ormas  
adalah organisasi

yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Badan



Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka yaitu sebanyak 115 Ormas. Maka dari itu kami melakukan pembinaan

ke setiap Sekretariat Ormas sekaligus mensosialisasikan Peraturan Ormas, selain itu Bakesbangpol Kabupaten Majalengka juga mengadakan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Setiap ormas mengirimkan ketua, sekretaris dan bendahara mengikuti kegiatan pemberdayaan ormas yang diadakan di Obyek Wisata Cipanten dan Kiara Danu Kabupaten Majalengka.

#### **f. PROGRAM YANG MENDUKUNG KINERJA**

Program Penunjang Capaian Tingkat Bina Kesatuan Bangsa

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Pengampu</b>
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp1.139.330.000	Bidang Kesatuan Bangsa
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.118.775.000	Bidang Kesatuan Bangsa
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 169.000.000	Bidang Poldagri dan Ormas
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;	RP. 36.157.463.000	Bidang Poldagri dan Ormas
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.697.867.681	Sekretariat

#### **g. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa yaitu sebesar 80,00% atau Rp. 155.892.462,00 dari pagu anggaran Rp. 41.316.399.014,00 dengan realisasi Rp. 41.160.506.552,00.

#### **h. Akuntabilitas Keuangan**

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kestuan Bangsa	80%	99,62%

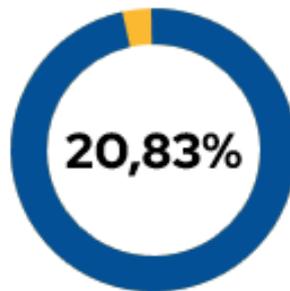
## 2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial

**Persentase penurunan potensi konflik sosial**

**IKU 2**

**Berkurangnya Potensi Konflik Sosial**

### CAPAIAN 2024



TARGET 100% REALISASI 20,83%

### PERBANDINGAN DENGAN

#### TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2023  
100%

17,24%

Capaian 2023  
100%

17,24%

#### TARGET AKHIR RPD

Target RPD  
100%

20,83%

Realisasi  
Kab/Prov 0,00

**KAB/PROVINSI**

### FAKTOR

Yang mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kewaspadaan Daerah

### PROGRAM

Yang mendukung

- ❖ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

### EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini tidak dapat dihitung dikarenakan IKU hanya 20,38%

### PERSENTASE PENURUNAN POTENSI KONFLIK SOSIAL



**a. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2024**

Target dengan Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	100%	20,83%	20,83%

Tingkat Bina Kesatuan Bangsa adalah data hasil deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Sasaran Berkurangnya Potensi Konflik Sosial dengan Indikator tercapai sesuai target kinerja. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan target dengan realisasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar 20.38%.

Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial yang meliputi Pemetaan konflik social di Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bersama Mitra Kepolisian Resort Majalengka, Komandan Distrik 0617 Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, Yonif Raider Galuh Taruna 321, Danlanud S Sukani, Subdenpom Majalengka, Kodam III Siliwangi, Densus 88 Anti Teros, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis dan Organisasi Pernagkat Daerah Terkait. Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bentuk Penyelenggaraan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah melalui Badan Kesbangpol melakukan berbagai upaya untuk menurunkan potensi konflik sosial, antara lain:

1. Pemetaan potensi konflik di berbagai daerah.
2. Peningkatan kewaspadaan dini dan deteksi dini potensi konflik.
3. Mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik.
4. Peningkatan dialog dan komunikasi antar kelompok masyarakat.
5. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat.

Selain itu, peran aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama sangat penting dalam menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial.

Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial dapat dihitung dengan rumus Jumlah Konflik Tahun kemarin dikurangi Jumlah Konflik Tahun Sekarang dibagi Jumlah Konflik Tahun Sekarang dikali seratus persen, maka konflik tahun 2023 sebanyak 145 konflik dan jumlah konflik pada tahun 2024 sebanyak 120 konflik social maka jumlah persentase indicator Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial 20.83 %. Dapat dilihat dibawah ini :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Tahun kemarin (2023) - Jumlah Konflik Tahun Berjalan (2024)}}{\text{Jumlah Konflik Tahun Berjalan (2024)}} \times 100$$

$$\frac{145 - 120}{120} = \frac{25}{120} = 0,2083 \times 100 = 20,83$$

### **b. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Peningkatan/Penurunan Realisasi
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	17.24	20,83%	3.59 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Bina Kesatuan Bangsa pada tahun 2024 mengalami Penurunan dibanding dengan nilai capaian tahun 2023. Terlepas dari hal tersebut diatas, pada prinsipnya upaya optimalisasi kinerja karyawan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan, terbukti dengan adanya 20.83 % capaian kinerja tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya (tahun 2023).

### **c. Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan Target akhir Renstra**

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Perbandingan Kinerja
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20,83%	100 %	20,83%

Dari tabel diatas dapat diketahui hasil perbandingan capaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial pada target akhir Renstra 2024-2026 relatif jauh dalam mencapai target akhir Renstra yang sudah ditetapkan, salah satu penyebab hal tersebut adalah dalam pengumpulan data pendukung dilaksanakan bulan September setiap tahunnya, sehingga data-data yang bersifat pendukung dari bulan Oktober s.d Desember setiap tahunnya tidak terhitung. Untuk mengatasi masalah tersebut kami berupaya semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan

sumber daya yang ada, terbukti pada tahun 2024 capaian kinerja Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial di Kabupaten Majalengka 80% dari tahun sebelumnya (tahun 2023)

**d. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Rata - rata Provinsi**

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Rata-Rata Prov 2024	Peningkatan/ Penurunan
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20,83%		

Berdasarkan tabel Indikator diatas tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat Provinsi karena indikator yang digunakan berbeda.

**e. Program Yang Mendukung Kinerja**

Program Penunjang Capaian Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial

Program	Anggaran	Pengampu
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 319.850.000	Bidang Kesatuan Bangsa

**f. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial pada sasaran Berkurangnya Potensi Konflik Sosial yaitu sebesar 20.38% atau Rp. 00,00 dari pagu anggaran Rp. 319.850.000,00 dengan realisasi Rp. 319.850.000,00.

**g. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Keberhasilan**

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Kewaspadaan

Daerah



Pentingnya

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial yang muncul di lingkungannya

membutuhkan perhatian dan pengetahuan yang

cukup untuk mengatasi masalah secara cepat. Hal ini dapat membantu dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan masalah sosial yang mungkin muncul di masyarakat. Partisipasi Dalam Tahap Pelaksanaan terhadap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebuah forum yang dibentuk untuk mengumpulkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang ancaman masyarakat atau ancaman lainnya, serta mengevaluasi kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Pembentukan FKDM sangat penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan ancaman keamanan di wilayahnya.

Untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan FKDM di Kabupaten Majalengka, telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya



FKDM, memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi anggota FKDM, serta membentuk program *reward* bagi anggota FKDM yang aktif dan berprestasi. Selain itu, pemerintah dan

masyarakat juga perlu bekerja sama dalam memfasilitasi akses dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh FKDM, seperti peralatan, transportasi, dan anggaran. FKDM di Kabupaten Majalengka sudah terbentuk sampai tingkat Kecamatan 8 orang FKDM Kabupaten dan 3 orang FKDM setiap kecamatan.



Tim Kewaspadaan Dini bertugas merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah

Daerah di daerah, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah, mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah

Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah dalam



pelaksanaan

Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang

mengancam stabilitas nasional dan memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah. Tim Wasdin Kabupaten Majalengka sebanyak 47 Orang Terdiri Dari Pemda Majalengka, Polres Majalengka, Kodim 0617 Majalengka, Lanud S. Sukani, Kejaksaan Negeri Majalengka, Deninteldam Kodam III Siliwangi, Badan Intelijen Negara (BIN), Densus 88.

#### **h. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Serapan Anggaran
Berkurangnya Potensi Konflik Sosial	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	20,83%	100%

# BAB 4

**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 telah mencapai target 50.41%. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,38% atau Rp. 155.892.462,00.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak baik bagi masyarakat.

# **LAMPIRAN**

## Perjanjian Kinerja



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**  
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, 5 September 2024

Pihak Kedua,

**H. DEDI SUPANDI**

Pihak Pertama,



**Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19660822 198903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	100 %
2	Berkurangnya Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Tertangani	100%

Kegiatan		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.697.867.681,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.139.330.000,00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 36.182.798.000,00
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 169.000.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 118.775.000,00
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 319.850.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp. <b>41.627.620.681</b>

Majalengka, 5 September 2024

Pj. Bupati Majalengka

  
**H. DEDI SUPANDI.**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



  
**Dr. H. HERI RAHYUBI, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19660822 198903 1 005



# Bukti Sebar LKIP

